

ABSTRAK

Abstrak

Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan salah satu tahapan awal yang perlu dilakukan dalam pengelolaan BMN. Pemanfaatan suatu BMN baru dapat dilakukan apabila barang yang ingin digunakan telah ditetapkan statusnya terlebih dahulu. Penelitian ini dilakukan terhadap penetapan status penggunaan BMN berupa kendaraan dinas yang digunakan dalam lingkungan Kementerian Keuangan dalam hal ini pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Pada umumnya kendaraan dinas yang dimiliki oleh tiap kantor pemerintahan berjumlah lebih dari satu, hal ini menyebabkan Pengguna Barang serta pihak-pihak lain yang bertugas dalam pengelolaan BMN perlu melaksanakan prosedur penggunaan BMN yang baik dan sesuai. Metode yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan wawancara. Penetapan status penggunaan barang memberikan kepastian hak, kewajiban, dan tanggung jawab bagi Kementerian/Lembaga sebagai Pengguna Barang. Pada umumnya PSP untuk BMN selain tanah/bangunan dilakukan melalui empat tahapan yang dimulai dari tahap permohonan hingga pendaftaran. Melalui penelitian ini akan dilakukan peninjauan terhadap proses penetapan status penggunaan BMN, apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta meninjau kendala yang dihadapi dalam penggunaan BMN.

Kata kunci: Penggunaan, Barang Milik Negara, Penetapan Status Penggunaan, KPPN Tanjungbalai.

Abstract

The use of State-Owned Assets (BMN) is one of the initial steps that need to be carried out in the management of BMN. Utilization of a new BMN can be done if the goods to be used have been determined in advance. This research was conducted on the determination of the status of the use of BMN in the form of official vehicles used within the Ministry of Finance in this case at the State Treasury Service Office (KPPN). In general, there are more than one official vehicle owned by each government office, this causes Asset Users and other parties in charge of BMN management to carry out good and appropriate procedures for using BMN. The method used in this research uses the literature study method and interviews. Determination of the status of the use of goods provides certainty of rights, obligations, and responsibilities for Ministries/Institutions as Asset Users. In general, PSP for BMN other than land/building is carried out through four stages starting from the application stage to registration. Through this research, a review will be carried out on the process of determining the status of the use of BMN, whether it is in accordance with applicable regulations and reviewing the obstacles faced in the use of BMN.

Keywords: The use, State-Owned Assets, Determining the status of State-Owned Assets, KPPN Tanjungbalai.